

# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN OLEH DINAS PARIWISATA KABUPATEN PANGANDARAN**

**Adi Setiadi<sup>1</sup>, Aan Anwar Sihabudin<sup>2</sup>, Etih Henriyani<sup>3</sup>**

*Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia<sup>1,2,3</sup>*

E-mail : adisetiadi99@gmail.com

## **ABSTRAK**

*Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil observasi yang menunjukkan belum optimalnya Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisataaan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut unuk mengetahui implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Informan sebanyak 10 orang. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : Implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran belum optimal karena belum mengacu pada standar/ukuran dan tujuan kebijakan pembangunan kepariwisataan selain itu sumber-sumber kebijakan seperti kapabilitas aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran sebagai implementor kebijakan pengembangan pariwisata masih belum optimal dan kurang mendapatkan dukungan anggaran yang memadai yang termuat dalam APBD Pangandaran. Sehingga menghambat program akselerasi pengembangan pariwisata, serta kurangnya dukungan penuh dari masyarakat sebagai salah satu pihak yang bersentuhan secara langsung dengan wisatawan di setiap obyek wisata. Permasalahan lainnya yang menjadi penghambat adalah kurangnya Dinas Pariwisata berperan sebagai perancang dan pelaksana kebijakan pengembangan pariwisata karena kurangnya dukungan secara aktif dari berbagai kelompok-kelompok kepentingan serta kurangnya kewenangan Dinas Pariwisata dalam pengembangan pariwisata karena kentalnya otoritas kekuasaan politik sehingga menghambat Dinas Pariwisata sebagai leading sektor pengembangan kepariwisataan. Dengan demikian untuk mengatasi permasalahan tersebut maka Dinas pariwisata telah melakukan pembentukan BPPID di Kabupaten Pangandaran untuk pengembangan sektor pariwisata, karena keberadaan BPPID akan menjadi komponen penguat jejaring industri pariwisata dan masyarakat pariwisata di Pangandaran.*

**Kata Kunci** : *Implementasi Kebijakan, Penyelenggaraan Kepariwisata, Pariwisata Daerah dan Pengembangan Wisata*

## **PENDAHULUAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menggariskan bahwa pembangunan pariwisata perlu ditingkatkan untuk memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan penerimaan devisa serta memperkenalkan alam dan kebudayaan bangsa Indonesia. Dalam menghadapi perubahan nasional dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata, perlu dilakukan pembangunan kepariwisataan yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan dan kekhasan bangsa dengan tetap menempatkan kebhinekaan sebagai satu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan penyerahan wewenang dari pemerintah kepada pemerintah daerah. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diantaranya mengatur kewenangan daerah, berimplikasi pada perubahan yang berhubungan dengan perubahan pembangunan dari sentralisasi ke desentralisasi termasuk pembangunan kepariwisataan. Sistem ini meletakkan pondasi pembangunan dengan memberikan otoritas kepada

pemerintah daerah untuk mengembangkan pariwisata daerah masing-masing.

Salah satu yang menjadi unsur pembangunan otonomi daerah adalah sektor pariwisata. Memang masih ada bagian dari pariwisata yang menjadi kewajiban pemerintah pusat untuk pengelolaan, namun pembangunan dari beberapa destinasi wisata sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pada waktu yang lalu pemerintah pusat memiliki tugas dan kewenangan untuk pembangunan pariwisata di berbagai daerah, kewenangan tersebut sebagian besar telah dilimpahkan, sehingga seyogyanya daerah otonom dapat mengambil inisiatif pembangunan. Memutuskan apa di mana dan bagaimana pariwisata akan dikembangkan di daerah yang bersangkutan bersama dengan para pihak terkait, dengan memperhatikan kebijakan di tingkat yang lebih tinggi. Sementara fungsi pemerintah pusat dalam hal ini akan lebih kepada pengarahan, pembinaan dan fasilitasi perencanaan atau kerjasama luar negeri dan sebagainya.

Pangandaran merupakan salah satu Kabupaten dengan potensi terbesar di sektor pariwisata, yang mana sektor pariwisata ini menjadi sektor unggulan yang menghasilkan pendapatan daerah terbesar bagi Kabupaten Pangandaran. Sampai saat ini terdapat beberapa

obyek wisata yang telah menjadi destinasi wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara, seperti: Pantai Pangandaran, Pantai Batukaras, Pantai Karapyak, Green Canyon (Cukang Taneuh), Pantai Batu Hiu, Curug Citumang, Pantai Madasari, Pantai Karang Nini, Curug Bojong, Cagar Alam Pananjung, Pantai Keusik Luhur, Santirah River Tubing, Saung Muara, Desa Wisata Selasari, Pantai Karang Tirta, Goa Sumur mudal dan Air Terjun Curug Jojogan. (Sumber: RIPPARDA Kabupaten Pangandaran Tahun 2020)

Adapun dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan berkaitan dengan antara lain hak dan kewajiban masyarakat, wisatawan, pelaku usaha, Pemerintah Daerah, penyelenggaraan kepariwisataaan yang komprehensif dan berkelanjutan, koordinasi lintas sektor, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata, badan promosi pariwisata, asosiasi kepariwisataan, standarisasi usaha, dan kompetensi pekerja pariwisata, serta pemberdayaan pekerja pariwisata melalui pelatihan sumber daya manusia.

Namun demikian dalam penyelenggaraan kepariwisataan belum dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran. Data jumlah

kunjungan ke objek wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi pengunjung untuk mendatangi suatu kawasan objek wisata yang antara lain faktor pelayanan, faktor sarana prasarana, faktor obyek dan daya tarik wisata alam, dan faktor keamanan serta dampak covid-19 pada tahun 2020 sehingga jumlah pengunjung mengalami penurunan. Oleh karena itu maka Implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan harus lebih dioptimalkan sehingga dapat meningkatkan kembali jumlah kunjungan wisata baik dari mancanegara maupun domestik.

Begitupula dengan hasil observasi yang peneliti lakukan ditemukan adanya permasalahan terkait dengan fluktuasinya jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata hal ini diduga disebabkan oleh belum optimalnya Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisataaan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran, hal ini terlihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Masih kurangnya koordinasi antar Dinas yang berkewenangan terkait dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Contohnya : dalam pengelolaan sampah masih dinilai belum optimal hal ini dikarenakan Dinas Pariwisata kurang melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

dalam pengelolaan sampah sehingga masih terlihat tumpukan sampah yang belum terangkut.

2. Masih kurangnya komitmen dari Dinas Pariwisata dalam melakukan pengembangan ekonomi kreatif di kawasan wisata Pangandaran. Contohnya : barang-barang industri kreatif belum di pasarkan secara umum seperti hasil kerajinan tangan (bahan dari batok, kelapa dan bambu), pakaian khas Pangandaran (seperti batik koja), maupun kuliner khusus di Pangandaran (seperti gula semut dan pindang gunung).
3. Kurangnya ketersediaan dana berupa anggaran yang memadai dalam mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan. Seperti masih kurangnya ketersediaan anggaran bagi pegawai dalam melaksanakan kebijakan sehingga keberadaan objek wisata belum dapat dikembangkan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Munculnya permasalahan tersebut tentunya akan mempengaruhi implementasi kebijakan dalam penyelenggaraan kepariwisataan di wilayah Pangandaran. Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisataan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran".

## KAJIAN PUSTAKA

Sebagai titik tolak atau landasan berpikir dalam menyoroiti atau memecahkan masalah perlu adanya pedoman teoritis yang dapat membantu. Landasan teori perlu ditegakkan agar penelitian mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (*trial and error*) landasan teoritis (Sugiyono, 2006:55).

Berdasarkan pendapat tersebut maka peneliti menggunakan beberapa teori yang ada kaitanya dengan ilmu pemerintahan. Hal ini dikarenakan adanya keterkaitan masalah implementasi kebijakan dalam penyelenggaraan kepariwisataan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran dengan kajian bidang ilmu pemerintahan. Hal ini sejalan dengan pendapat Suryaningrat (2000:67) mengatakan bahwa : "Ilmu Pemerintahan mempelajari segala macam usaha pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk menciptakan kemakmuran dan kebahagiaan masyarakat".

Dengan demikian implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran memiliki kaitan dengan bidang kajian ilmu pemerintahan mengingat implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran jika dilaksanakan dengan baik maka tujuan atau usaha pemerintah dalam menciptakan kemakmuran dan kebahagiaan masyarakat akan tercapai.

Keberhasilan implementasi kebijakan juga sangat ditentukan oleh variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Adapun variabel-variabel tersebut menurut Wahab (2017:165) antara lain: “standar/ukuran dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, ciri-ciri atau karakteristik badan/instansi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, sikap para pelaksana dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik”.

Begitu pula dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dijelaskan pada Pasal 1 Ayat (9) bahwa: “Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah”.

Dengan demikian implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran dapat tercapai apabila unsur-unsur pendukung tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

## **METODE**

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Menurut Nawawi (2013:63), mengemukakan bahwa : “Metode

deskriptif analisis dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan cara menggambarkan, melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan faktor-faktor yang tampak atau sebagaimana adanya”.

Lamanya penelitian selama 7 bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi). Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang. Teknik analisa data dengan dengan cara deskriptif, yaitu mengumpulkan data, mengolah data, menganalisa data serta menginterpretasikannya pada data kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Untuk mengetahui implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran, peneliti menggunakan variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Wahab (2014:165), yang antara lain standar/ukuran dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, ciri-ciri atau karakteristik badan/instansi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, sikap para pelaksana dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Dengan demikian variabel-variabel tersebut dijadikan sebagai dasar dalam melakukan penelitian

mengenai implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran yang penulis sajikan melalui wawancara dengan informan dan observasi yang hasilnya sebagai berikut :

### **1. Standar/Ukuran dan Tujuan Kebijakan.**

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal maka akan sulit direalisasikan. Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis diketahui bahwa petugas kurang melaksanakan berbagai sasaran dalam penyelenggaraan kepariwisataan karena kurangnya kesadaran petugas untuk mencapai tujuan dari penyelenggaraan kepariwisataan serta kurangnya keterpaduan antar pelaksana dilapangan yang menyebabkan petugas kurang optimal dalam melaksanakan tugasnya.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Surbakti (2013:199), yang menyatakan bahwa :

Pelaksanaan suatu kebijakan didasarkan pada rencana yang ditetapkan sehingga keberhasilan suatu kebijakan ditentukan dengan baik buruknya proses perencanaan yang disusun. Dengan demikian dalam penyusunan perencanaan suatu kegiatan sebaiknya disesuaikan dengan waktu penyusunan kegiatan, tempat dilaksanakannya kegiatan, situasi yang mendukung atau menghambat keberhasilan suatu kegiatan serta adanya anggaran yang memadai dalam pelaksanaan suatu kebijakan yang akan dilaksanakan.

Dengan demikian maka dalam pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan supaya dapat menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antar pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, maka perlu keterpaduan antar pemangku kepentingan dengan melakukan perencanaan suatu kegiatan dengan melibatkan semua pihak sehingga terjalin koordinasi yang baik dalam penyelenggaraan kepariwisataan.

### **2. Sumber-sumber kebijakan**

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi

menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran tentu saja memerlukan dukungan anggaran pada ranah implementasi. Dukungan anggaran yang terutama termuat pada dokumen APBD menjadi demikian penting karena keterlaksanaan seluruh program akselerasi pengembangan pariwisata bertumpu pada ketersediaan anggaran untuk membiayai berbagai program dan proyek pengembangan. Keterbatasan anggaran dalam pengembangan sektor pariwisata sangat jelas berdampak pada belum maksimalnya infrastruktur kepariwisataan di Kabupaten Pangandaran. Salah satu faktor yang berpengaruh dalam pengembangan pariwisata adalah tersedianya infrastruktur kepariwisataan.

Keberadaan infrastruktur kepariwisataan tentu saja mempengaruhi proses pelaksanaan program-program pengembangan pariwisata yang akan dilaksanakan. Hal lain adalah bahwa tidak semua obyek wisata di Kabupaten Pangandaran berada di wilayah yang strategis. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan aksesibilitas melalui sarana dan prasarana yang baik, bukan hanya

akses jalan menuju obyek wisata saja yang mengalami kerusakan tetapi juga akses jalan poros penghubung dengan wilayah lain mengalami kerusakan. Hasil observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa kondisi perbaikan infrastruktur dalam bentuk jalan penghubung sedang dalam tahap pengerjaan dan perbaikan, meskipun baru terjadi pada sebagian kecil akses yang dibutuhkan. Hal ini tentu saja sangat mengganggu dan membahayakan keselamatan bagi para wisatawan yang ingin mengunjungi obyek wisata yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Pangandaran.

### **3. Ciri-ciri atau karakteristik badan/instansi pelaksana**

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis diketahui bahwa petugas kurang melaksanakan tugasnya dalam

penyelenggaraan kepariwisataan karena ketidakjelasan struktur kerja dan fungsi kerja yang ditetapkan bagi pihak-pihak pelaksana kebijakan, akibatnya pola hubungan dan norma-norma kerja menjadi tidak efektif bahkan cenderung stagnan sehingga menimbulkan ketidakefektifan terhadap program-program kebijakan pengembangan pariwisata yang telah ditetapkan.

Begitupula menurut pendapat Wahab (2014:165) menyatakan bahwa: “Dalam suatu implementasi kebijakan karakteristik pelaksana harus tepat dengan kebijakannya yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, karena akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan”.

Selanjutnya demikian menurut Subarsono (2010:167) menyatakan bahwa: “Dalam suatu implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan maksimal harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan”.

Namun demikian, terkait dengan kewenangan dalam pengelolaan destinasi wisata di Kabupaten Pangandaran, informan dari unsur anggota DPRD mengungkapkan bahwa sampai sekarang tidak ada kejelasan pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kawasan wisata, seperti

yang terjadi pada kawasan pantai pangandaran, belum terdapat regulasi yang jelas bagaimana kawasan pantai tersebut dikelola, dan tidak terdapat satu SKPD pun yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kawasan pantai barat dan pantai timur pangandaran, yang merupakan destinasi unggulan.

#### **4. Komunikasi antarorganisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan**

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu. Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi.

Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis diketahui bahwa petugas kurang melaksanakan pembentukan badan promosi daerah dalam meningkatkan kunjungan wisata karena keberadaan Badan Promosi Daerah belum mampu mengembangkan pemasaran dan promosi pariwisata di dalam dan di luar negeri melalui peningkatan efektifitas pemasaran dan promosi pariwisata terpadu berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Menurut Wahab (2014:165) menyatakan bahwa : “Komunikasi



antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para implementor yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu komunikasi dan koordinasi merupakan hal yang penting agar tujuan dan sasaran dapat tercapai.

Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (*accuracy and consistency*). Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian pula sebaliknya.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang semestinya berperan sebagai perancang dan pelaksana kebijakan, memang kurang memiliki peran dominan dalam perencanaan pengembangan pariwisata pada tahap pertama ini, yakni pembangunan infrastruktur dan fasilitas kepariwisataan. Meski demikian, dalam berbagai kesempatan, Bupati Pangandaran dan seluruh perangkat dinas khususnya Disparbud, senantiasa mensosialisasikan program akselerasi pengembangan pariwisata kabupaten Pangandaran, dalam berbagai

kesempatan, termasuk penggunaan media cetak maupun elektronik.

### **5. Sikap para pelaksana**

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”.

Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis diketahui bahwa petugas kurang melaksanakan tanggungjawabnya dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan kepariwisataan sehingga petugas kurang dalam mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam kawasan pariwisata dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Implementasi kebijakan menurut Wahab (2014:165) menyatakan sebagai berikut : “Sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Sikap para pelaksana diawali penyaringan lebih dahulu melalui

persepsi dari pelaksana dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan”.

Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pengetahuan, pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan. Kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan. Implementasi kebijakan yang berhasil bisa jadi gagal karena tidak sepenuhnya menyadari standar dan tujuan kebijakan dan mungkin dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan. Sebaliknya apabila sikap para pelaksana bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut maka implementasi kebijakan akan berhasil.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai implementor kebijakan amat memahami bahwa terdapat berbagai kelompok yang berkepentingan dengan kebijakan pengembangan pariwisata, yang dengan sendirinya akan membantu Dinas Pariwisata dalam mengembangkan sektor kepariwisataan, sehingga kerjasama yang baik melalui pelibatan secara aktif kelompok-kelompok kepentingan tersebut dalam berbagai program kerja yang sudah dirumuskan, akan memudahkan pemerintah daerah dalam percepatan pencapaian tujuan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran, dibawah koordinasi Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.

## **6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik**

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis diketahui bahwa petugas telah melaksanakan penyelenggaraan kepariwisataan karena daya dukung berupa peraturan-peraturan dalam penyelenggaraan kepariwisataan sudah baik hal ini dikarenakan pemerintah daerah telah membuat peraturan daerah.

Menurut implementasi kebijakan menurut Wahab (2014:165) bahwa : “Kondisi sosial ekonomi sebuah masyarakat yang maju, sistem politik yang stabil dan demokratis, dukungan baik dari konstituen maupun elit penguasa dan budaya keseharian masyarakat yang mendukung akan mempermudah implementasi sebuah kebijakan”.

Benar bahwa urusan pengembangan pariwisata merupakan urusan bersama pemerintah daerah dan

SKPD terkait, tapi semestinya kepentingan keterlaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata adalah menjadi kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Hal ini mencerminkan bahwa otoritas kekuasaan politik masih amat kental, inovasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai leading sektor pengembangan kepariwisataan yang merupakan cerminan desentralisasi belum nampak dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran. Acuan arah dan tujuan pengembangan masih bersifat *top down* sebagai manifestasi politik sentralisasi pada skala pemerintah daerah kabupaten. Disisi lain, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai pelaksana kebijakan pengembangan pariwisata membutuhkan kewenangan yang kuat dalam mendapatkan proteksi dari kepentingan politis yang mungkin muncul dalam ranah kepariwisataan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran belum optimal karena belum mengacu pada standar/ukuran dan tujuan kebijakan pembangunan kepariwisataan selain itu sumber-sumber kebijakan seperti kapabilitas

aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran sebagai implementor kebijakan pengembangan pariwisata masih belum optimal dan kurang mendapatkan dukungan anggaran yang memadai yang termuat dalam APBD Pangandaran. Sehingga menghambat program akselerasi pengembangan pariwisata, serta kurangnya dukungan penuh dari masyarakat sebagai salah satu pihak yang bersentuhan secara langsung dengan wisatawan di setiap obyek wisata. Permasalahan lainnya yang menjadi penghambat adalah kurangnya Dinas Pariwisata berperan sebagai perancang dan pelaksana kebijakan pengembangan pariwisata karena kurangnya dukungan secara aktif dari berbagai kelompok-kelompok kepentingan serta kurangnya kewenangan Dinas Pariwisata dalam pengembangan pariwisata karena kentalnya otoritas kekuasaan politik sehingga menghambat Dinas Pariwisata sebagai *leading* sektor pengembangan kepariwisataan. Dengan demikian untuk mengatasi permasalahan tersebut maka Dinas pariwisata telah melakukan pembentukan BPPID di Kabupaten Pangandaran untuk pengembangan sektor pariwisata, karena keberadaan BPPID akan menjadi komponen penguat jejaring industri pariwisata dan masyarakat pariwisata di Pangandaran.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran sebaiknya dilaksanakan sesuai dengan variabel-variabel yang mempengaruhi implemementasi kebijakan sehingga penyelenggaraan kepariwisataan di objek wisata Pangandaran dapat terlaksana dengan baik.
2. Sebaiknya meningkatkan keterlibatan semua pihak dalam penyusunan rencana strategis kepariwisataan sebagai pedoman dan arah pembangunan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran, sehingga sasaran dan target kebijakan akan semakin jelas dan terukur upaya lainnya dapat dilakukan dengan meningkatkan intensitas pendidikan dan pelatihan profesi kepariwisataan bagi aparatur pariwisata sehingga permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan kepariwisataan dapat dioptimalkan dan mengupayakan adanya pembentukan institusi otonom yang memiliki “*authority*” mutlak dalam pengelolaan kawasan wisata, sehingga regulasi kepariwisataan akan menjadi jelas dan memiliki kepastian hukum.
3. Sebaiknya melaksanakan pengembangan pariwisata dengan melibatkan secara aktif *stakeholders* kepariwisataan dan masyarakat, sehingga perencanaan

pengembangan yang terjadi merupakan dokumen perencanaan bersama antara pemerintah, sektor swasta dengan masyarakat serta melakukan pendekatan dengan DPRD sebagai lembaga politik dan normatif, hendaknya membangun kesamaan visi dan persepsi serta pemahaman mendalam tentang konteks dan konten pembangunan inklusif yang mengedepankan sektor pariwisata sebagai basis pembangunan, sehingga dapat terbangun *mindset* kepariwisataan yang sama, selain itu dapat melakukan pengembangan kebijakan pariwisata dengan menggunakan perspektif “*collaborative governance*”, sehingga berbagai potensi pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dapat berelaborasi dalam memanfaatkan berbagai kekuatan yang ada untuk meningkatkan peluang menghadapi persaingan global pariwisata.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Nawawi, Hadari. 2013. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah. Mada University Press.
- Subarsono. 2009. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Surbakti, 2013, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Universitas Terbuka.

- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI. Panduan KKL.
- Wahab, Solichin. 2014. *Analisis Kebijakanaksanaan dari Formulasi ke. Implementasi Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan